

BAB 3

PERAN INDONESIA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PROSES PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

Pembahasan pada bab ini akan difokuskan pada keberhasilan Indonesia sebagai mediator dalam proses mediasi konflik Kamboja. Agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proses mediasi konflik Kamboja serta peran Indonesia sebagai mediator maka bab ini akan dibagi ke dalam dua bagian yakni, *pertama*, alasan keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik Kamboja yang akan melakukan analisa pada faktor-faktor yang mendorong Indonesia untuk menjadi mediator pada konflik Kamboja. *Kedua*, keberhasilan peran Indonesia sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Kamboja yang akan melakukan analisa terhadap berbagai tindakan Indonesia dalam proses mediasi konflik Kamboja hingga akhirnya konflik tersebut terselesaikan. Elaborasi pada bagian ini akan dilakukan dengan menggunakan teori Marvin Ott tentang kapabilitas mediator sehingga bagian ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3.1 Alasan Keterlibatan Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Kamboja

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia berupaya untuk mendukung azas prinsip-prinsip persamaan antar sesama negara, yang tercapai melalui penentuan nasib sendiri suatu negara sehingga dapat hidup berdampingan secara damai. Oleh sebab itu Indonesia dengan tegas menentang campur tangan pihak asing, serta berbagai macam tekanan dari segi politik, ekonomi, maupun ideologi suatu negara terhadap negara lainnya, karena hal ini tidak sesuai dengan apa yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 di mana Indonesia memiliki tanggung jawab untuk turut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, pendudukan Vietnam atas Kamboja pada tahun 1979 jelas telah melanggar norma-norma internasional atas azas "*non interference and non use of force*", dan bertolak belakang dengan politik luar negeri Indonesia pada saat itu. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB

menggariskan peraturan mengenai penyelesaian sengketa secara damai dan melarang negara-negara anggotanya untuk menggunakan kekerasan dalam hubungannya antara satu sama lain. Sementara pasal 33 piagam menyebutkan beberapa kebebasan prosedur yang dapat ditempuh oleh negara-negara dalam penyelesaian konflik secara damai.

Pada tataran regional, konflik Kamboja di lain pihak juga merupakan rintangan atas terwujudnya *zone of peace, freedom and neutrality* di Asia Tenggara (ZOPFAN) serta pelanggaran atas kesepakatan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN merasa bertanggung jawab untuk memainkan peran yang penting dalam rangka mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Dalam pandangan Indonesia, Kamboja yang independen dan bebas dari pengaruh pihak asing merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya perdamaian, stabilitas dan kerjasama di kawasan sehingga Indonesia merasa terpanggil untuk memberikan andil yang sangat dibutuhkan untuk mempromosikan keamanan di wilayah, khususnya terhadap konflik yang tengah berkejolak di Kamboja.¹²⁰ Hal ini sejalan dengan teori peran seperti diungkapkan oleh Holsti yang menggariskan fungsi mediator harus merupakan kebijakan politik luar negeri suatu negara yang mampu dan bertanggung jawab untuk menjalani tugas-tugas mediasi sehingga kompeten untuk menawarkan diri dan turut campur dengan berbagai cara dalam rangka menyelesaikan konflik di suatu negara.

Dipandang dari sudut pandang lain, dapat dikatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN di tengah-tengah masa Perang Dingin yang melanda dunia pada saat itu adalah tantangan ideologi. Indonesia dan negara-negara ASEAN merupakan negara-negara non komunis, sementara melalui kemenangan Vietnam Utara terhadap Vietnam Selatan pada tahun 1975 yang menyatukan kedua Vietnam di bawah paham komunis, serta pendudukan

¹²⁰ Posisi Luar Negeri Indonesia terhadap isu Kamboja tecermin dalam beberapa pernyataan, salah satu diantaranya adalah pernyataan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja pada Sidang ke 41 Majelis Umum PBB tanggal 26 September 1986 yang menyebutkan:

“In our view, a genuinely independent and non-aligned Kempuchea, friendly to its neighbours and posing no threat to them remains an essential pre-requisite for peace, stability, and cooperation in the region.”

Diambil dari Jurnal Luar Negeri Vol V, November 1986. (Jakarta: Balitbang Deplu, 1986). Hal 41.

Vietnam atas Kamboja pada tahun 1979 secara praktis telah menandakan kemenangan paham komunis di kawasan Indochina.

Pada tataran orientasi umum, implementasi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang tidak berpihak pada blok ideologi manapun sesungguhnya tidak identik dengan ketidakterlibatan.¹²¹ Arah politik bebas dan aktif Indonesia pada saat itu tidaklah bersifat seperti benda mati atau pasif, namun lebih dapat diartikan sebagai bebas dari segala ikatan apapun, baik itu militer, politik ataupun ideologis, sehingga sesungguhnya Indonesia dapat bebas berperan aktif dalam setiap persoalan ataupun kejadian di dunia, tanpa terpengaruh apapun dari berbagai ikatan militer, politik dan ideologi.

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, bagi Indonesia, terwujudnya perdamaian di Kamboja diharapkan dapat tercapai pada saat yang tepat di mana Indonesia sedang memasuki tahap pembangunan di dalam negeri,¹²² sehingga Indonesia tidak pernah memiliki maksud untuk menyimpang dari ASEAN, karena kerjasama ASEAN merupakan pilar utama yang akan mempengaruhi strategi politik luar negeri pada kepentingan prioritas dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional terutama dalam konteks kerjasama keamanan di kawasan.¹²³ Jaminan stabilitas kawasan merupakan *sine qua non*¹²⁴ terhadap pembangunan nasional Indonesia.¹²⁵ Paling tidak, secara prinsip sikap Indonesia selama ini khususnya sebagai *Interlocutor* ASEAN dan ketua bersama Konferensi Paris telah menunjukkan peran yang sangat aktif dalam proses penyelesaian yang menyeluruh terhadap konflik Kamboja.¹²⁶

Dalam ranah pengaruh lingkungan kawasan berkaitan dengan konflik Kamboja, Indonesia berpendapat bahwa hegemoni China di kawasan adalah tidak

¹²¹ J.Soedjati Djiwandono. "Indonesia's Post Cold War Foreign Policy." *Indonesian Quarterly* Vol. XXII No.2. 1994.

¹²² Turut ditegaskan oleh Dirjen Politik Departemen Luar Negeri, Wiryono Sastrohandoyo seperti dikutip dari artikel "Menlu Ali Atlas: jalan Panjang dan Berliku-liku mencapai Titik Akhir." *Suara Pembaruan*, tanggal 23 Oktober 1991

¹²³ Michael Leifer, *op. cit.*, hal 161 – 197.

¹²⁴ *Sine qua non* atau *conditio sine qua non* (jamak *sine quibus non*) awalnya adalah istilah latin untuk "(suatu kondisi) yang tanpanya, maka tidak akan tercipta suatu situasi tertentu. Atau juga dapat diartikan sebagai tanpanya maka tidak akan tercapai apapun. Istilah ini mengacu kepada suatu tindakan yang mutlak dibutuhkan atau sangat diperlukan sebagai resep inti.

¹²⁵ Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI Tahun 1989. Diambil dari Jurnal Luar Negeri Vol XIV, Januari 1990. (Jakarta: Balitbang Deplu, 1990). Hal 3.

¹²⁶ "ASEAN Menapis 'Impor Konsep Keamanan Kawasan.'" *op. cit.*

baik dan menganggapnya sebagai suatu ancaman.¹²⁷ Di sisi lain, Indonesia juga berpandangan bahwa tekanan China atas Vietnam akan berakibat pada meningkatnya ketergantungan Vietnam kepada Uni Soviet sehingga dampak yang lebih jauh adalah keterlibatan kekuatan-kekuatan besar di kawasan yang akan memperburuk keadaan. Kedekatan Vietnam dengan Uni Soviet semakin nyata dengan keputusan Vietnam yang mengizinkan Uni Soviet untuk membangun basis-basis militernya di wilayah Da Nang dan Ca Ranh Bay.¹²⁸ Ini merupakan pertama kali Uni Soviet menanamkan basis-basis militernya di Vietnam, dan tidak lama setelah itu, Uni Soviet melancarkan serangannya ke Afghanistan sehingga hal ini secara tidak langsung mulai memicu ketegangan di tatanan global. Sebagai dampak lebih jauh dari kejadian ini, maka ASEAN kemudian seperti mendapat tekanan dari pihak Amerika Serikat.

Dengan demikian, Indonesia memandang bahwa Vietnam dapat berfungsi sebagai *buffer zone* terhadap pengaruh China yang berupaya untuk menginfiltrasi kawasan Asia Tenggara. Lebih jauh lagi, kompleksitas konflik Kamboja terjadi disebabkan adanya perbenturan antar kepentingan nasional masing-masing negara yang terlibat dalam konflik ini sehingga berakibat pada semakin keruhnya situasi dan berujung pada semakin sulitnya tercapai upaya menuju perdamaian yang menyeluruh. Kendati pada awalnya Indonesia cenderung dekat dengan Vietnam, namun secara konsensus Indonesia tetap berpegang pada sikap ASEAN yang mengecam tindakan Vietnam untuk menduduki Kamboja dan seolah-olah menjadi kepanjangan tangan dari Uni Soviet dengan dukungan penuh militernya terhadap Vietnam. Di sisi lain, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang tengah membangun kesadaran bahwa jika konflik Kamboja tidak kunjung diselesaikan, atau ditunda-tunda, maka hal ini akan tentunya akan semakin mempersulit pola kerjasama di kawasan yang berujung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di kawasan.¹²⁹

Malaysia yang juga sepeham dengan Indonesia dalam menghadapi ancaman China di kawasan kemudian bersepakat untuk mengeluarkan Deklarasi

¹²⁷ Mun Mun Majumdar. "The Kampuchean Crisis and Indonesia." *Indonesian Quarterly* Vol XXII No.2. 1994. Hal 159.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Sabam Siagian. "Potensi Konflik dan Perdamaian di Asia Tenggara: Asia-Afrika dan Perkembangan Kawasan." *Analisa CSIS* 1985-4.

Kuantan pada bulan Maret 1980 yang pada prinsipnya memandang bahwa dalam rangka mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan, maka Vietnam haruslah bersikap netral dan bebas dari pengaruh baik Uni Soviet ataupun China. Masalah Kamboja hanya akan dapat diselesaikan melalui penyelesaian politik dan bukan penyelesaian secara militer serta pengakuan kedua negara tentang adanya kepentingan khusus Vietnam di wilayah Kamboja.¹³⁰ Pemikiran Indonesia dan Malaysia ini pada prinsipnya didasarkan pada harapan bahwa melalui pengakuan tersebut dapat mendorong Vietnam untuk mengurangi jarak dari Uni Soviet sehingga secara lebih jauh dapat lebih mengendurkan kepentingan keamanan Vietnam di kawasan Indochina sehingga konflik Kamboja dapat terselesaikan.¹³¹ Inisiatif yang cenderung bersifat prematur ini menandai peningkatan perhatian baik pada tataran regional dalam konteks ruang lingkup ASEAN, maupun aktor-aktor internasional seperti negara-negara yang memiliki perhatian khusus terhadap Kamboja dan juga PBB.

Sangat disayangkan bahwa upaya awal ini tidak berhasil membujuk Hanoi untuk memberikan komitmen terhadap upaya rekonsiliasi, justru secara mengejutkan Vietnam meluncurkan serangannya di wilayah Thailand pada bulan Juni 1980. Konferensi Menteri Luar Negeri ASEAN tanggal 25-26 Juni 1980 menentang keras tindakan ini sehingga secara tidak langsung hal ini menandai kemunduran kesepakatan Kuantan yang telah digagas oleh Indonesia dan Malaysia. Oleh karenanya, sebagai pihak yang mengupayakan mediasi, Indonesia mencoba berbagai cara lainnya untuk dapat mewujudkan penyelesaian konflik Kamboja. Peranan mediasi yang diambil Indonesia dalam proses penyelesaian konflik Kamboja dapat dilihat pada subbab berikut ini.

3.2 Keberhasilan Peran Indonesia Sebagai Mediator

Terselesaikannya konflik Kamboja melalui proses mediasi yang panjang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan peran aktif Indonesia sebagai mediator. Dalam rangka menganalisa tolak ukur keberhasilan peran mediator, maka digunakan kerangka Marvin Ott yang berpandangan bahwa keberhasilan fungsi mediasi akan sangat tergantung pada kapabilitas sang mediator. Jika dikaitkan

¹³⁰ Sjamsumar Dam dan Riswandi, *op. cit.*, hal 83.

¹³¹ Bambang Cipto, *op. cit.*, hal 52.

dengan peran Indonesia, maka peran Indonesia dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut:

1. Ketidakberpihakan Indonesia dalam isu yang menjadi sengketa;
2. independensi Indonesia dari pihak-pihak yang bertikai;
3. penerimaan Indonesia oleh pihak-pihak yang bertikai;
4. dihormatinya Indonesia oleh pihak-pihak yang bertikai;
5. pengetahuan dan keahlian Indonesia dalam memecahkan masalah;
6. kepemilikan sumberdaya fisik yang dimiliki oleh Indonesia, yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian konflik (misalnya tempat rapat, fasilitas transportasi, dan komunikasi, sumberdaya manusia untuk keperluan inspeksi dan verifikasi).

3.2.1 Ketidakberpihakan Indonesia Dalam Isu yang Menjadi Sengketa

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian alasan keterlibatan Indonesia dalam proses penyelesaian konflik Kamboja, maka pada kriteria pertama ini, Indonesia dapat dikatakan memenuhi kapabilitas untuk tidak berpihak dalam isu yang menjadi sengketa. Tarik-menarik kekuasaan yang menjadi sengketa di Kamboja bukanlah hal yang dikejar oleh Indonesia. Sebaliknya, sebagai negara merdeka dan bertanggung jawab untuk menciptakan perdamaian dunia, posisi Indonesia terhadap konflik Kamboja lebih didasarkan pada perhatian Indonesia untuk mengembalikan hak-hak dasar dan kepentingan rakyat Kamboja. Dalam perannya sebagai mediator, Indonesia lebih didorong oleh tanggung jawab untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara.

Indonesia secara terang-terangan menentang campur tangan pihak asing dan berbagai bentuk tekanan dari segi politik, ekonomi, maupun ideologi suatu negara terhadap negara lainnya, di mana hal tersebut merupakan prinsip Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945. Dalam menjalankan politik luar negerinya yang bebas dan aktif, Indonesia pun menerapkannya dalam keterlibatannya pada proses mediasi konflik Kamboja. Indonesia bebas dari faksi yang bertikai ataupun kepentingan lainnya, dan aktif menjaga perdamaian dunia dengan mengupayakan penyelesaian konflik di Kamboja.

Jika pada tahap awal konflik Kamboja berkejolak, kebijakan Indonesia lebih didominasi dengan peranan militer, baik dalam bentuk bantuan persenjataan dan perlengkapan, pelatihan perwira-perwira Kamboja di Indonesia, hingga pengiriman suatu misi penasihat militer Indonesia pada Kamboja.¹³² Namun kebijakan ini berubah saat Menlu Adam Malik berhasil meyakinkan Presiden Soeharto bahwa dukungan Indonesia dalam bentuk militer akan menimbulkan berbagai implikasi politik yang kompleks. Kontribusi Indonesia dalam mengupayakan perdamaian di Kamboja akan lebih membantu secara efektif melalui media diplomasi seperti dialog dan negosiasi atau penyelenggaraan konferensi di tingkat internasional sehingga dapat menarik perhatian dunia terhadap situasi di Kamboja.¹³³

Selanjutnya, seolah menegaskan ketidakberpihakan Indonesia dalam isu yang menjadi sengketa di Kamboja ditunjukkan oleh Menlu Mochtar dengan menyatakan kepedulian Indonesia terhadap hak Kamboja sebagai negara untuk dapat menentukan nasibnya sendiri. Misalnya saja ia menyatakan bahwa bagaimanapun pertikaian Kamboja, pihak luar tidak perlu meributkan soal Pol Pot karena itu merupakan urusan rakyat Kamboja sendiri. Walau negara-negara lain, termasuk ASEAN tidak menghendaki rezim Pol Pot untuk berkuasa lagi, tetap akan lebih baik untuk menyerahkan saja hal tersebut kepada rakyat Kamboja sendiri. Melainkan menurutnya, yang terpenting adalah upaya menyelesaikan masalah Kamboja secara menyeluruh, khususnya yang menyangkut Vietnam.¹³⁴

Oleh karena itu, menyangkut konflik Kamboja, Indonesia menghindari keberpihakan pada isu menjadi akar konflik yang ditanggung oleh berbagai kepentingan, sebaliknya Indonesia justru berperan aktif mewujudkan upaya penciptaan perdamaian di Kamboja atas dasar tanggung jawabnya sebagai negara dan sebagai anggota ASEAN yang menjunjung kebebasan suatu negara dari pendudukan pihak asing. Ketidakberpihakan ini pun dijalankan untuk

¹³² Duta Besar kelima Indonesia untuk Kamboja; Ishak Djuarsa (1971-1975) merupakan utusan khusus Presiden RI sebagai penasihat militer untuk Presiden Republik Khmer (Lon Nol) Nazaruddin Nasution, dkk, *op. cit.*, hal 60.

¹³³ Michael Leifer, *op. cit.*, hal 193.

¹³⁴ "Menlu Mochtar: ASEAN Juga Tidak Menghendaki Pol Pot Berkuasa Lagi di Kamboja." *Antara*, 8 Februari 1984.

menghindari terjadinya bias kepentingan dalam penyelesaian konflik yang sedang diupayakan.

Oleh karena ketidakberpihakan Indonesia pada isu sengketa konflik Kamboja, justru Indonesia dapat dengan leluasa menjembatani pihak-pihak yang bertikai, di antaranya adalah menjembatani Kamboja, Vietnam, ASEAN, dan bahkan muncul gagasan/ peluang akan normalisasi hubungan dengan China agar dapat memperoleh gambaran tentang posisi China dalam masalah konflik Kamboja.¹³⁵ Hal-hal tersebut kemudian dapat menjadi bukti peran Indonesia sebagai mediator yang tidak berat sebelah terhadap isu yang berkejolak dalam konflik Kamboja yang dipenuhi dengan berbagai kepentingan. Hal ini juga secara tidak langsung dapat mengimbangi pandangan berbagai pihak yang mensinyalir faktor kedekatan Indonesia dengan pihak Vietnam. Hikmah lain yang juga dapat dimanfaatkan adalah kesempatan Indonesia untuk mendekati pihak Khmer Rouge pada kesepakatan perdamaian.

3.2.2 Independensi Indonesia dari Pihak-pihak yang Bertikai

Untuk memahami kriteria independensi Indonesia dari pihak-pihak yang bertikai maka terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu bahwa Indonesia memiliki kedekatan khusus dengan Vietnam di awal-awal berlangsungnya proses penyelesaian konflik, hubungan Indonesia dengan Kamboja, dan Indonesia yang merupakan *Interlocutor* atau mitra wicara yang menjembatani komunikasi antara ASEAN dan Vietnam yang harus menjalankan kebijakan atau posisi yang sudah digariskan oleh organisasi.

a) Hubungan Indonesia dengan Vietnam

Dekatnya hubungan Indonesia dengan Vietnam bisa dibilang didasari pada pandangan bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki kesamaan sejarah, di mana perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari kekuasaan penjajah merupakan persepsi yang paralel dan untuk itu mengundang rasa hormat dan salut dari pihak Vietnam.¹³⁶ Sehingga terdapat hubungan

¹³⁵ “Dr. Sudjati Djiwandono: Indonesia Tidak Meninggalkan Rekan-rekan ASEAN.” *Kompas*, 10 Maret 1984.

¹³⁶ J. Soedjati Djiwandono; Indonesia – Vietnam Bilateral Seminar. *Indonesia Quarterly* vol XII No.2 1984. Hal. 152

emosional antara Indonesia (di bawah pimpinan Soekarno) dan Vietnam (di bawah pimpinan Ho Chi Minh).¹³⁷ Di samping itu, perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara di kawasan ASEAN pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Vietnam di tahun 1955, yaitu dengan menjalin hubungan setingkat Konsulat Jenderal, baru kemudian meningkatkan hubungan di tahun 1964 menjadi Kedutaan Besar. Bukti lain dari kedekatan Indonesia dengan Vietnam adalah dibentuknya Asosiasi Persahabatan Indonesia-Vietnam pada tahun 1957. Setelahnya, kegiatan saling kunjung juga dilakukan oleh kedua negara yang ditandai dengan kunjungan dalam tingkat kepala negara yaitu kunjungan Presiden Vietnam Ho Chi Minh ke Indonesia sebanyak dua kali pada tahun 1959, dan kunjungan Presiden Indonesia Soekarno ke Vietnam sebanyak 6 kali di tahun 1959.¹³⁸

Lebih jauh lagi, Vietnam menaruh rasa hormat kepada Indonesia atas pandangan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak memihak kepada blok militer manapun, bahkan tidak memiliki ataupun mengizinkan basis-basis militer asing yang berdiri di negaranya. Hal ini mengindikasikan Indonesia sebagai negara yang paling non blok di antara yang lain. Indonesia juga dapat dikatakan sebagai satu-satunya negara di ASEAN yang tidak terlibat dalam perang Vietnam.¹³⁹

Kegiatan saling kunjungan di tingkat menteri pun dijalankan oleh kedua negara. Menlu Mochtar pertama kali melakukan kunjungan ke Hanoi pada tahun 1978 sebagai kunjungan balasan Menlu Vietnam pada tahun 1977.¹⁴⁰ Kemudian, serangkaian kunjungan berikutnya merupakan misi yang dijalankan oleh Indonesia sebagai *Interlocutor* atau mitra wicara ASEAN dengan Vietnam guna membuka jalan menuju negosiasi konflik Kamboja, di samping membina hubungan dalam berbagai bidang yang telah lama terjalin dengan Vietnam. Perlu dipahami, bahwa kendati sikap ASEAN pada saat itu

¹³⁷ *Indonesia-Vietnam Dalam Perspektif Kebudayaan*. Diakses dari http://www.budpar.go.id/filedata/2636_1049-IndVietnam.pdf, (waktu akses 7 April 2009, pukul 20.10wib).

¹³⁸ *Diplomatic Relation between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam*. Diakses dari <http://www.indonesia-hanoi.org.vn/modules.php?op=modload&name=News&file=index&opcase=viewnewscat&mcid=23>, (waktu akses 7 April 2009, pukul 21.13wib).

¹³⁹ *Ibid.* Hal 154

¹⁴⁰ "Kunjungan Bilateral dan bukan Bicarakan Kampuchea." *Pelita*, 2 Maret 1985

cenderung menunjukkan sikap yang tidak bersahabat terhadap negara-negara komunis kawasan Indochina, namun di dalam tubuh ASEAN sendiri terdapat polarisasi pandangan terhadap konflik Kamboja–Vietnam terhadap faktor geopolitik kawasan Indochina. Hal itu karena adanya fakta bahwa konstelasi hubungan internasional memasuki tahun 1990-an telah bergeser ke arah ekonomi politik sebagai target kebijaksanaan luar negeri suatu negara. Kawasan Indochina yang memiliki komposisi penduduk berkisar 73 juta jiwa tidak dapat disangkal sebagai sumber ekonomi pasar yang sangat potensial.¹⁴¹

Oleh karenanya, selain Indonesia yang memiliki kedekatan historis dengan Vietnam, Thailand dan Singapura sebagai anggota ASEAN memiliki tendensi untuk memandang geopolitik konflik Kamboja sebagai ajang pasar guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang ketimbang sebagai ajang pertempuran. Dalam hal ini, Indonesia mencoba untuk tidak menyalakan kesempatan yang ada dengan meningkatkan perdagangan dan investasi dengan Vietnam. Hal ini dibuktikan dengan pembukaan jalur penerbangan pertama Indonesia–Vietnam.¹⁴²

Tidak hanya melalui jalur "*first track diplomacy*" yang ditempuh melalui hubungan antar pemerintah, namun jalur "*second track diplomacy*" juga turut ditempuh oleh kedua negara, dalam rangka meningkatkan tahapan *people to people contact* serta memelihara hubungan yang telah dijalin demi tercapainya jalan keluar konflik Kamboja. Atas dasar rasa saling menghormati dan niat yang luhur untuk bersama-sama mengatasi konflik yang berkejolak di kawasan, maka diselenggarakanlah seminar bertema Hubungan Bilateral Indonesia dan Vietnam dalam Perspektif Regional pada tanggal 25-26 Februari 1984. Tujuan dari penyelenggaraan seminar ini adalah sebagai upaya untuk mencari keselarasan pandangan dari kedua negara, serta meningkatkan kerjasama yang menguntungkan kedua negara di berbagai bidang. Hasil yang dicapai pada seminar ini secara garis besar

¹⁴¹ Komposisi penduduk negara-negara Indochina di awal tahun 90an terdiri dari Vietnam yang berpenduduk sekitar 63 juta jiwa, Kamboja sekitar 7 juta, dan Laos sekitar 3 juta. Lihat M.Abriyanto. "Kenapa ASEAN Khawatir Terhadap Rezim Phnom Penh?" Ed. Muchtar E. Harahap dan M.Abriyanto, *op. cit.*, hal 71.

¹⁴² C.P.F. Luhulima, *op. cit.*, (1989). Hal 444.

dapat dikatakan cukup selaras dengan sikap kedekatan Indonesia dengan Vietnam yang tercermin pada pernyataan L.B. Moerdani di Hanoi pada awal bulan yang sama.¹⁴³

Hasil yang dicapai dari kedua pertemuan ini, sekalipun secara substansi tidak membahas secara khusus proses penyelesaian konflik Kamboja, namun Indonesia cukup jelas memosisikan dirinya dengan solidaritas dan integritas ASEAN. Kendati demikian, Indonesia juga menegaskan pandangannya yang tidak rela untuk membiarkan Vietnam terisolasi dan berada pada posisi yang tidak menguntungkan sehingga Indonesia secara tidak langsung menunjukkan dukungan terhadap legitimasi kepentingan keamanan Vietnam.¹⁴⁴

Pada kunjungan Menlu Mochtar di pertengahan tahun 1985, berbagai media memberitakan sikap Vietnam yang memuji sikap Indonesia yang cenderung independen dan realistis dalam memandang masalah di kawasan. Di samping itu Vietnam juga memuji Indonesia sebagai bagian dari ASEAN yang memiliki hubungan terdekat dengan Vietnam, untuk itu Vietnam akan menyambut baik inisiatif Indonesia untuk melakukan dialog dengan Hanoi, kendati Hanoi berharap agar Indonesia dapat sejalan dengan visinya yang menekankan bahaya ancaman hegemoni China di kawasan.¹⁴⁵ Dengan demikian, sebagai mitra wicara resmi dengan Hanoi, Indonesia menetapkan kebijakan *dual track* yaitu dengan meluncurkan upaya guna mencari garis rekonsiliasi dengan Hanoi, dan pada saat yang bersamaan mencoba untuk memelihara kesatuan ASEAN.

¹⁴³ Lihat naskah sambutan Ketua Delegasi Indonesia Jusuf Wanandi pada Seminar Bilateral Indonesia-Vietnam. "Prospects and Peace Stability in Southeast Asia and For The Solution Of The Conflict In Kampuchea". *Indonesian Quarterly* 12/2 (April 1984), hal 201-202.

¹⁴⁴ Seminar Indonesia-Vietnam untuk kedua kalinya digelar di Jakarta pada tanggal 18-20 Februari 1985 dengan sasaran untuk lebih menemukan titik terang dari pertemuan yang pernah digelar sebelumnya. Seminar kedua ini berhasil menyatukan persepsi kedua negara dan menyepakati pandangan akan pengalaman sejarah melawan konstruksi ekspansionisme China di kawasan. Kedua negara juga berhasil merancang parameter mendasar tentang politik, ekonomi dan perkembangan keamanan di kawasan yang bebas dari gangguan kekuatan-kekuatan besar. Hal ini seperti yang ditanggapi oleh media setempat merupakan suatu hasil yang memberi harapan, di mana interaksi yang dijalin antara Vietnam dan Indonesia merupakan salah satu faktor yang mendukung upaya pencarian solusi atas masalah yang tengah dihadapi oleh kawasan.

¹⁴⁵ "Menjaga Agar Saluran Tetap Terbuka Antara ASEAN-VIETNAM." *Kompas*, 15 Maret 1985.

Dapat dikatakan bahwa atas dasar hubungan khusus inilah, Indonesia dipercaya oleh negara-negara anggota ASEAN untuk bertindak sebagai *Interlocutor*, yaitu karena azas kepercayaan yang mutual telah terbangun antara kedua negara. Atas usul Menlu Singapura pada kunjungan pertemuan khusus Menlu-menlu ASEAN di Jakarta tanggal 7-8 Mei, para Menlu ASEAN secara resmi menunjuk Indonesia untuk terus melanjutkan dialognya dengan Vietnam dalam rangka mencari penyelesaian masalah Kamboja¹⁴⁶. Hal ini diyakini oleh negara-negara anggota ASEAN akan bermanfaat sebagai jembatan upaya komunikasi pihak ASEAN dengan Vietnam yang selama ini kerap menemui jalan buntu.¹⁴⁷

b) Hubungan Indonesia dengan Kamboja

Hubungan antara Indonesia dengan Kamboja pun telah berlangsung cukup lama. Namun, penjajahan yang menimpa kedua negara sempat membuat hubungan di antara keduanya terputus. Hubungan baru mulai terjalin saat kedua negara telah mencapai kemerdekaan. Tepatnya, saat Pangeran Sihanouk menghadiri KAA di Bandung tahun 1955, hubungan kedua negara mulai dirintis kembali. Sejak itu, kedua kepala negara pun melakukan kegiatan saling kunjung, dengan masing-masing lima kali dalam kurun waktu 1959-1965.¹⁴⁸ Kemudian, hubungan keduanya semakin dekat setelah ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan Indonesia-Kamboja pada Februari 1959 yang di antaranya memuat kesepakatan untuk membuka perwakilan diplomatik. Hasilnya, pada Maret 1962, perwakilan Indonesia ditempatkan di Kamboja, dan tahun 1964, perwakilan Kamboja ditempatkan di Indonesia.¹⁴⁹

¹⁴⁶ "Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Kamboja; ASEAN tetap Pertahankan Sikap". *Kompas* 9 Mei 1984.

¹⁴⁷ Beberapa pendapat berpandangan bahwa faktor kedekatan Indonesia dengan Vietnam merupakan sebab terpilihnya Indonesia sebagai *Interlocutor* ASEAN. Kendati hal ini dapat bersifat terbuka untuk diperdebatkan, beberapa tulisan yang mendukung pandangan ini antara lain: Mun Mun Majumdar, *op. Cit.*, "Menlu tegaskan lagi tentang ihwal Kamboja". *Suara Karya* 6 Maret 1984, "Muangthai Dukung Usaha Terobosan Pecahkan Soal Kamboja". *Kompas* 15 Maret 1984, "Isyarat dan Undangan kepada Hanoi". *Sinar Harapan* 9 Mei 1984, "Penyelesaian Kamboja; Pembukaan Baru". *Suara Karya* 2 Juni 1984 dan "Usaha Indonesia Untuk Cari Penyelesaian". *Suara Pembaruan* 6 Mei 1991.

¹⁴⁸ Nazaruddin Nasution, *dkk, op. cit.*, hal 3.

¹⁴⁹ *Ibid.* Hal 25.

Meskipun hubungan kedua negara terjalin cukup baik, tetap ada indikasi bahwa hubungan keduanya tidak selalu berada dalam kondisi yang harmonis. Kemunduran hubungan antara Indonesia dan Kamboja yang ditandai dengan kepindahan KBRI Phnom Penh ke Bangkok pada tahun 1975 banyak dipengaruhi oleh konflik internal di dalam negeri Kamboja itu sendiri. Sekitar tahun 1970-an, ketika transisi pemerintahan di Kamboja terjadi, di mana pemerintahan *Khmer Republic* jatuh dan diambil alih oleh pemerintahan demokratik Kamboja di bawah kekuasaan Khmer Merah pimpinan Pol Pot, telah merubah politik luar negerinya menjadi cenderung tertutup.¹⁵⁰ Hingga akhirnya tahun 1978, upaya pengaktifan kembali perwakilan Indonesia di Phnom Penh mulai dijalankan. Namun sayang, walau rencana tersebut telah diupayakan, kondisi konflik Kamboja yang semakin berkembang dengan adanya invasi dari Vietnam membuat upaya tersebut urung dilaksanakan. Sehingga, kondisi tersebut membuat Indonesia memutuskan untuk tetap membekukan hubungan diplomatik dengan Kamboja dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Phnom Penh dialihkan ke Bangkok.¹⁵¹

Kendati Indonesia telah membekukan hubungan diplomatiknya dengan Kamboja, tetapi Indonesia tetap berupaya menjalankan politik luar negerinya yang bebas aktif, dengan ikut serta dalam upaya perdamaian bagi Kamboja.

Dari kilasan sejarah hubungan antara Indonesia dengan Vietnam dan Indonesia dengan Kamboja di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Vietnam. Sehingga, atas dasar itulah, dalam kriteria indenpendensi antara pihak yang bertikai tidak berhasil dipenuhi oleh Indonesia. Namun di balik itu, kondisi ini ternyata dapat dimanfaatkan oleh ASEAN untuk menjadikan Indonesia sebagai penjembaran antara ASEAN dengan Vietnam dalam mengupayakan penyelesaian konflik Kamboja. Dalam perkembangannya sebagai *Interlocutor* sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya, faktor

¹⁵⁰ *Ibid.* Hal 69.

¹⁵¹ *Ibid.*

kedekatan Indonesia dan Vietnam tetap terbina walau isu konflik Kamboja menjadi batu sandungan dalam hubungan kedua negara.

c) Indonesia sebagai *Interlocutor* ASEAN dengan Vietnam

Fakta bahwa Indonesia cenderung memiliki kedekatan dengan pihak Vietnam, pada prinsipnya adalah tidak sejalan dengan prinsip ASEAN yang justru menyesali pendudukan Vietnam di Kamboja karena telah melanggar hukum-hukum internasional.¹⁵² Oleh karena itu, dalam perkembangannya, Indonesia seakan menjalankan diplomasi dua arah yaitu untuk menjaga hubungan dengan Vietnam, dan mengupayakan penyelesaian konflik Kamboja bersama-sama dengan negara-negara ASEAN dan melalui forum PBB.¹⁵³ Kendati demikian, penunjukan Indonesia oleh ASEAN sebagai *Interlocutor* dengan Vietnam, dengan jelas menerangkan upaya yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk menutup perbedaan dan menemukan pijakan bersama antara posisi ASEAN dan Vietnam. Dalam kondisi ini, Indonesia secara prinsip harus menunjukkan niat mewujudkan perdamaian di Kamboja dengan mempersatukan seluruh pihak yang bertikai ke dalam suatu negosiasi.

Kedekatan Indonesia dengan Vietnam dan invasi Vietnam ke Kamboja merupakan alasan Indonesia dihadapkan pada tanggung jawabnya untuk menjaga keharmonisan dan kredibilitas sebagai bagian dari visi ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan. Atas dasar tersebut dan beban moral yang ditanggung Indonesia sebagai pendiri ASEAN, Indonesia akhirnya mengharmoniskan kebijakannya dengan ASEAN.

Di sisi lain, kedekatan Indonesia dengan Vietnam sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mencari peluang perdamaian di Kamboja. ASEAN mengusulkan agar Indonesia terus melakukan pendekatan secara kontinyu dengan pihak Vietnam, untuk mencari penyelesaian konflik Kamboja. Meski begitu Indonesia pun terus menegaskan keterikatan Indonesia kepada

¹⁵²Posisi ASEAN terhadap Vietnam sangatlah jelas, dimana menjunjung tinggi prinsip "*inviolability of the sovereign rights*" terhadap legitimasi pemerintahan Democratic Kampuchea. Lihat Soendaro Rachmad, *op. cit.*, hal 94.

¹⁵³Asnani Usman. "Indonesia, Asia Tenggara dan Selatan; Empat Puluh Tahun Indonesia Merdeka, Politik Luar Negeri." *Analisa CSIS* Tahun XIV, No. 8 Agustus 1985.

kebijaksanaan ASEAN dalam penyelesaian konflik Kamboja,¹⁵⁴ yaitu bersama-sama dengan ASEAN menentang keberadaan pasukan asing di Kamboja, dan mendukung upaya penentuan nasibnya sendiri melalui pemerintahan yang dipilih oleh mereka sendiri.

Upaya keras Indonesia dalam melakukan pendekatan dengan pihak Vietnam guna mencari penyelesaian konflik pun terkadang masih tidak diimbangi dengan sikap Vietnam yang cenderung kurang kooperatif dan terus melancarkan berbagai serangan di wilayah Kamboja. Indonesia yang semula cenderung menunjukkan sifat yang toleran terhadap pemerintahan Hanoi, kemudian bersama ASEAN mulai menunjukkan keberatannya atas tindakan Vietnam yang menempatkan pasukannya di Kamboja.

Menghadapi berbagai tantangan dan kendala sebagai *Interlocutor*, Indonesia tetap mantap menunjukkan antusiasnya untuk melakukan pendekatan diplomasi guna penyelesaian konflik Kamboja. Langkah-langkah yang ditempuh selanjutnya oleh Indonesia dengan memanfaatkan kedekatannya dengan Vietnam adalah melalui serangkaian kunjungan ke Vietnam guna mencari terobosan yang diperlukan. Pengutusan Letjen L.B. Moerdani ke Hanoi dalam kapasitas sebagai utusan khusus untuk membicarakan isu terkait dengan Menlu Nguyen Co Thach merupakan bukti komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pendekatan diplomasinya guna meyakinkan Vietnam untuk memberikan konsesi terhadap pendekatan misi rekonsiliasi.¹⁵⁵ Kunjungan L.B. Moerdani kemudian mendapatkan kunjungan balasan Menlu Co Thach pada November 1982.

L.B. Moerdani untuk kedua kalinya kembali mengadakan kunjungan ke Hanoi dari tanggal 6-8 Februari 1984 guna lebih meraih suatu fleksibilitas dari pihak Vietnam. Dalam kunjungannya, Sang Jenderal mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyatakan bahwa “Indonesia dan angkatan bersenjataanya tidak memandang Vietnam sebagai ancaman di Asia Tenggara”. Menanggapi pernyataan kontroversial ini, Menlu Mochtar dengan segera memberikan klarifikasi kepada negara-negara ASEAN

¹⁵⁴ “Menlu Tegaskan Lagi Ihwal Kamboja.” *Suara Karya*, 6 Maret 1984.

¹⁵⁵ C.P.F. Luhulima, *op. cit.*, (1989). Hal 591.

lainnya mengenai ketaatan komitmennya dengan posisi ASEAN dan pernyataan Moerdani merupakan eksploitasi media masa saja.¹⁵⁶

Indonesia kemudian melanjutkan pembicaraan dengan Vietnam pada kunjungan balasan menlu Co Thach ke Jakarta pada tanggal 12-14 Maret 1984 yang semakin meningkatkan *trust building* antar kedua negara dan secara paralel antara Vietnam dengan ASEAN. Pada kesempatan tersebut, Mochtar menawarkan solusi terhadap solusi Kamboja dengan mengacu kepada kerangka PBB dan resolusi yang dicapai pada ICK.¹⁵⁷ Dalam tanggapannya kepada Presiden Soeharto, Menlu Thach mengungkapkan keberatannya atas usulan ASEAN terhadap kemerdekaan Kamboja. Menanggapi pernyataan tersebut, Presiden Soeharto secara diplomatis mencoba untuk memberikan solusi dengan cara memodifikasi usulan ASEAN tersebut sehingga dapat mengakomodir posisi Vietnam, serta memberikan ruangan untuk melibatkan Vietnam dalam upaya penyelesaian konflik Kamboja.

Prinsip Indonesia adalah bahwa kebijakan konfrontasi tidak akan berhasil untuk menemukan solusi, namun hanya berakibat pada kondisi yang semakin menyulitkan. Dalam hal ini, sikap yang akomodatif merupakan media yang mutlak ditempuh agar mendapatkan solusi yang efektif. Indonesia kemudian melanjutkan usahanya dengan melanjutkan pembicaraan dengan Vietnam demi mencapai pendekatan yang lebih realistis dan kompromi atas konflik Kamboja. Namun Vietnam yang bersikukuh untuk tidak mengurangi serangkaian serangannya, dan justru malah melucurkan serangan besar-besaran pada saat yang paling tepat yaitu selama musim panas pertengahan dekade tahun 1980-an, berakibat pada keputusan bersama ASEAN untuk mengirimkan bantuan persenjataan dan materil kepada gabungan kekuatan perlawanan (koalisi *tripartite*). Keputusan ini meraih dukungan melalui hasil pertemuan menlu ASEAN pada 11 Februari 1985.

¹⁵⁶ "Penjelasan di Bandar Seri Begawan." *Majalah Tempo* 01/XIV 3 Maret 1984

¹⁵⁷ "Menlu Vietnam Tiba di Jakarta, Usul ASEAN Soal Kamboja Dibahas Lagi." *Harian Merdeka* 12 Maret 1984.

Walaupun posisi ASEAN cukup jelas kepada Vietnam terhadap konflik Kamboja, Indonesia tetap menjalin hubungan yang baik dengan Vietnam dalam konteks *people to people contact*.

Sejalan dengan upaya yang dijalankan oleh Menlu Mochtar, L.B. Moerdani menerima Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Van Tien Dung di bulan April 1985. Pada kesempatan tersebut, L.B Moerdani kembali membuat pernyataan yang kontroversial yang memojokan posisi Indonesia terhadap ASEAN. L.B.Moerdani menyatakan bahwa “Indonesia tidak pernah menjadi musuh bagi Vietnam, dan Vietnam tidak pernah menjadi musuh bagi Indonesia”. Pernyataan yang secara terang-terangan menyatakan posisi Indonesia yang pro Vietnam kembali harus diluruskan oleh Menlu Mochtar.

Melanjutkan upaya Indonesia, Mochtar menerima kunjungan balasan menlu Nguyen Co Thach di Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1985 yang semakin menegaskan peran Indonesia sebagai *Interlocutor* ASEAN. Pertemuan tersebut antara lain membahas kelanjutan pembicaraan 12 butir usulan pemerintah Indonesia.¹⁵⁸ Kunjungan ini dapat dipandang sebagai momentum penting di mana pada pertemuan tersebut Vietnam telah mengumumkan rencananya untuk menarik keluar pasukannya dari Kamboja sampai dengan tahun 1990.¹⁵⁹

Indonesia melalui Menlu Mochtar membuat terobosan dengan kerangka 12 butir menuju penyelesaian masalah Kamboja. Konsep ini kemudian diadopsi oleh ASEAN sebagai kerangka umum. Kerangka tersebut secara garis besar terdiri dari penarikan mundur pasukan Vietnam, pemilihan umum, *security zone*, *strategic framework*, dan *strategic objectives*.¹⁶⁰

¹⁵⁸ ”Menurut Vietnam, Pembicaraan Mochtar-Thach Langkah Baru Penyelesaian Krisis Kamboja.” *Harian Suara Karya*, 21 Agustus 1985.

¹⁵⁹ ”Deklarasi bersama Phnom Penh, Vietnam dan Laos.” *Suara Pembaruan*, 10 April 1989.

¹⁶⁰ *Ibid.* Kerangka Strategis “12 Butir” konsep Menlu Mochtar terdiri dari:

1. Kerangka Pemikiran guna mencari penyesuaian antara pihak yang berselisih serta yang berkepentingan di Kamboja.
2. Kesepakatan mengenai tujuan strategis.
3. Kerangka waktu (*timeframe*) sebagai pedoman pelaksanaan.
4. Konsep atau bentuk konferensi / format perundingan.
5. Perundingan antara pihak-pihak yang berselisih.
6. Rekonsiliasi nasional terhadap seluruh faksi yang berselisih.
7. Penarikan pasukan Vietnam dari wilayah Kamboja.

Pada pertemuan tingkat menteri GNB di Luanda tanggal 2-8 September 1985, Menlu Mochtar menyatakan bahwa posisi Indonesia terhadap konflik Kamboja adalah didasarkan pada perhatian Indonesia untuk mengembalikan hak-hak mendasar serta kepentingan rakyat Kamboja yang menganut status *non-aligned*.¹⁶¹

Pada waktu yang hampir bersamaan, tepatnya pada tanggal 6 September 1985 bertempat di Paris, Perancis, pemimpin kelompok koalisi Sihanouk yang baru saja mengadakan pertemuan dengan Menlu Perancis, Roland Dumas, menggagas suatu pertemuan tidak resmi yang dapat mempertemukan seluruh pihak yang terlibat yaitu keempat faksi, Vietnam, China dan Uni Soviet beserta negara-negara anggota ASEAN.¹⁶² Usulan ini dimaksud sebagai suatu langkah pendahuluan yang diharapkan dapat memecah semua kebuntuan dan akhirnya dapat membuka jalan menuju perundingan resmi. Gagasan yang dikenal dengan *Cocktail Party* ini, menurut Sihanouk dapat diselenggarakan di Perancis, namun pihak Perancis belum juga menyatakan kesediannya terhadap gagasan dimaksud.

Langkah yang ditempuh Menlu Mochtar selanjutnya adalah dengan menindaklanjuti proposal "*Cocktail Party*" yang telah digagas oleh Sihanouk tersebut dengan menyatakan kesediaan Indonesia untuk menjadi tempat penyelenggaraan rencana tersebut, namun dengan memodifikasi para partisipannya dari yang semula diajukan oleh Sihanouk sebelumnya, dikurangi dengan negara-negara di luar kawasan seperti yang digagas oleh Sihanouk.¹⁶³

Gagasan itu seperti yang telah disinggung di bab sebelumnya memiliki sasaran untuk mempertemukan faksi-faksi yang tergabung dalam CGDK, perwakilan dari pemerintahan Heng Samrin di Phnom Penh, dan

8. Pembentukan zona aman.

9. Pembentukan pasukan internasional sebagai pemelihara ketertiban.

10. Komisi pengawasan internasional yang akan bertugas sebagai pemantau proses penyelesaian.

11. Pemilihan umum.

12. Pembentukan pemerintahan baru.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² "Sihanouk Usulkan "*Cocktail Party*" Internasional Mengenai Kampuchea." *Sinar Harapan*, 6 September 1985.

¹⁶³ "Indonesia Invites Hanoi to '*Cocktail Party*'." *Jakarta Post*, 30 November 1985.

pemerintahan Hanoi demi membahas kemungkinan penyelesaian konflik. Hal yang sama juga disampaikan kepada pihak Vietnam dalam kunjungan Mochtar ke Hanoi. Pada bulan April 1987, Mochtar melakukan kunjungan ke Hanoi untuk menghidupkan kembali gagasan *Cocktail Party* antara faksi-faksi yang bertikai dengan pihak pemerintah Vietnam.

Pada pertemuan informal menlu ASEAN di Bangkok, Thailand menyuarkan aspirasinya yaitu bahwa pertemuan yang direncanakan hanya akan memberikan legitimasi dan pengakuan terhadap rezim Heng Samrin. Baik Thailand maupun Singapura menginginkan agar Vietnam turut terlibat dalam pembicaraan. Sementara berdasarkan pemahaman Vietnam yang dicapai melalui Mochtar dan Co Thach, Vietnam berpandangan bahwa mereka hanya akan melibatkan diri apabila seluruh faksi di dalam CGDK telah mencapai rekonsiliasi internal.¹⁶⁴

Buah dari perjuangan Indonesia mecapai titik terang pada saat Menlu Mochtar mengunjungi *Ho Chi Minh City* pada tanggal 27-29 Juli 1987 untuk membicarakan proses penyelesaian konflik dengan pemimpin Vietnam. Hasil dari kunjungan tersebut membuahkan komunike bersama tentang rencana pertemuan informal atau yang disebut dengan "*Cocktail Party*" yang rencananya akan dilakukan selama dua tahap. Pertama, pihak Vietnam menghendaki pertemuan antara CGDK dan kelompok Heng Samrin, kedua, adalah pertemuan yang akan melibatkan Vietnam dan ASEAN di dalamnya.¹⁶⁵

Melalui komitmen yang dinamakan "*Ho Chi Minh Understanding*" ini, Indonesia berhasil mendapat jaminan dari pihak Vietnam untuk turut hadir pada pertemuan dimaksud, seperti yang dikutip sebagai berikut: "*Understanding was reached that an informal meeting of the two sides of Kampuchea be held on the basis of equal footing, without preconditions and with no political labels, to which, at a later stage, Indonesia will invite other concerned countries, including Vietnam, to participate*". Dengan tercapainya kesepakatan ini, maka langkah-langkah berikutnya seakan menjadi jauh lebih mudah bagi Indonesia, karena jalan sudah terbuka dengan lebar yang

¹⁶⁴ Mun Mun Majumdar, *op. cit.*, hal 165.

¹⁶⁵ Tim Peneliti Univ. Airlangga, *op. cit.*, hal 94.

diraih melalui pendekatan diplomatik, bukan dengan kekerasan. Perkembangan ini juga telah memperlihatkan kemajuan yaitu dengan melunaknya sikap keras masing-masing yang ditunjukkan selama ini. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan kesediaan pemerintahan Phnom Penh untuk turut serta dalam perundingan *Cocktail Party*.

Selama ini berbagai upaya yang ditujukan kepada pihak Vietnam ataupun PRK seakan membentur tembok, di mana pemerintahan Heng Samrin kerap menunjukkan sifat keras kepalanya dengan menolak untuk berunding dengan pihak DK. Atas dasar pertimbangan inilah, Mochtar menggagas ide untuk diadakannya pertemuan yang bersifat informal sehingga seluruh faksi akan bersedia pada pertemuan tersebut. Bagai pucuk dicinta ulam, pemikiran ini pula yang turut tercermin dalam salah satu persyaratan yang diajukan oleh Vietnam agar dapat turut hadir pada acara *Cocktail Party* tersebut yaitu agar bentuk dialog diselenggarakan dengan prinsip atau atas dasar tanpa prasyarat, tanpa label politik dan atas persamaan derajat.¹⁶⁶

Kendala kemudian dihadapi oleh Indonesia dengan resistensi pihak DK untuk berpartisipasi dalam *Cocktail Party* tersebut. Di sisi lain, pencapaian Indonesia melalui *Ho Chi Minh City Understanding* juga tidak mendapatkan pengakuan dari pihak ASEAN.

Sebagai wakil Indonesia, Mochtar menunjukkan sikapnya yang pantang menyerah dalam memainkan peran aktif sebagai *Interlocutor*. Untuk itu, Mochtar kemudian melanjutkan diplomasi Indonesia melalui pertemuan dengan pimpinan CGDK, Norodom Sihanouk di Korea Utara pada 6 Juli 1987.¹⁶⁷ Menlu Mochtar yang menyadari bahwa hal yang tidak dapat diabaikan adalah peran kunci yang dimainkan Sihanouk terhadap teka-teki upaya perdamaian yang berkepanjangan ini. Kehadirannya pada setiap tahapan pembicaraan, seakan membawa pengaruh yang begitu signifikan terhadap setiap pihak.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Ton That Thein. "The Deadly Trap." *Far Eastern Economics Review*, 27 Agustus 1987. Indochina Report. (Singapore: Executives Publication Pte, Ltd, 1987). Hal 17.

¹⁶⁷ Nazaruddin Nasution, dkk, *op. cit.*, hal 118.

¹⁶⁸ ASEAN memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia, di mana Norodom Sihanouk memegang peran kunci terhadap upaya perdamaian yang menyeluruh di Kamboja, karena

Maksud kunjungan tersebut antara lain adalah untuk mempertanyakan alasan keputusan Sihanouk yang mengajukan cuti selama satu tahun. Sihanouk kemudian menjelaskan bahwa sebab dari permintaan cuti tersebut adalah karena terdapat perbedaan di dalam tubuh CGDK yang telah meresahkan dirinya. Sihanouk melihat bahwa perannya sebagai pemimpin telah ternodai dengan berbagai tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh DK dan KPNLF. Maka perjuangan awal dari terdirinya CGDK yaitu untuk melawan Vietnam dan rezim yang diciptakannya seakan-akan tidak berarti. Pada kesempatan tersebut, Sihanouk juga menyampaikan bahwa apabila memungkinkan, dia ingin bertemu dengan Hun Sen sebagai itikad baik, dan dengan pendekatan kekeluargaan untuk mencari solusi terhadap masalah Kamboja.

Kendati menghadapi berbagai rintangan dan ujian, Indonesia tetap melaju dengan misinya untuk menata pembicaraan informal. Sampai dengan saat itu, beberapa kemajuan yang dipandang sangat signifikan adalah pendekatan Indonesia yang dilakukan kepada dua negara *superpower* yang memainkan peran vital di belakang layar yaitu China dan Uni Soviet. Menlu Mochtar yang berada di akhir masa jabatannya, secara meyakinkan berhasil menjamin komitmen mereka terhadap upaya penyelesaian konflik ini. China melalui Menlunya Wu Xueqian dan mantan Menlu Uni Soviet, Eduard Shevardnadze bertemu dengan Menlu Mochtar pada saat berlangsungnya sesi Majelis Umum PBB di New York tanggal 15 September 1987. Pertemuan membicarakan tentang mekanisme dan berbagai upaya penyelesaian konflik Kamboja di mana telah tercapai suatu terobosan baru melalui pernyataan China yang menyebutkan bahwa mereka pada prinsipnya tidak berniat untuk membiarkan kelompok DK yang didukungnya kembali ke tampuk kekuasaan. Hal ini merupakan suatu langkah positif terhadap kelangsungan proses rekonsiliasi Kamboja.

Selain itu, pada saat yang bersamaan, para menlu anggota ASEAN juga menyatakan kepuasan mereka atas perkembangan yang dicapai pada

Sihanouk dipandang sebagai satu-satunya figur pemersatu bangsa Kampuchea dan diterima serta dihormati oleh berbagai pihak di dalam negeri dan juga oleh masyarakat internasional. Lihat Tim Peneliti Univ. Airlangga, *op. cit.*, hal 97.

kunjungan Mochtar ke Ho Chi Minh yang dapat mengamankan komitmen pihak Vietnam untuk turut serta mengambil peran dalam rencana penyelenggaraan *Cocktail Party*. Uni Soviet di lain pihak juga menunjukkan keseriusannya dalam mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan ASEAN untuk mencari penyelesaian konflik. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan yang dilakukan oleh wakil Menlu Uni Soviet, Igor Rogachev ke beberapa negara ASEAN yaitu Filipina, Malaysia, Thailand dan Indonesia.¹⁶⁹ Dalam serangkaian pertemuan tersebut, pada intinya Moskow berniat untuk menegaskan komitmennya dengan mendesak pihak Vietnam agar bersedia mengikuti proses perundingan damai yang tengah diupayakan.

Vietnam yang juga secara prinsip juga memiliki itikad baik terhadap proses penyelesaian masalah Kamboja berupaya untuk mengupayakan agenda komitmennya melalui upaya rekonsiliasi nasional antara faksi-faksi yang bertikai serta berusaha mendukung upaya untuk mempertemukan Sihanouk dengan Hun Sen agar dapat berunding.

Pada 2 Desember 1987, Sihanouk dan Hun Sen bertemu untuk pertama kalinya di Perancis untuk dapat meredakan ketegangan di antara kedua kubu dan melakukan tukar menukar pandangan demi membahas langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh kedua pihak. Hasil dari pertemuan ini kembali menemukan jalan buntu setelah pembicaraan diwarnai dengan perdebatan dan aksi saling tuduh. Satu-satunya kemajuan yang dicapai pada pembicaraan tersebut adalah kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan konflik Kamboja di bawah payung dan mekanisme PBB. Pertemuan kemudian berlanjut pada tanggal 20-22 Januari 1988 dengan pembahasan lanjutan yang mempersempit wilayah-wilayah perbedaan guna mengidentifikasi pijakan bersama atas aspek-aspek masalah yang dihadapi. Demi menindaklanjuti pernyataan dukungan Moskow atas upaya perdamaian, Menlu Mochtar terbang ke Moskow pada bulan Februari 1988 guna membicarakan kelanjutan pembicaraan sebelumnya.

¹⁶⁹ Nazaruddin Nasution, dkk, *op. cit.*, hal 117.

Berakhirnya masa jabatan Menlu Mochtar, tidak berarti berakhir pula perjuangan diplomasi Indonesia di kancah diplomasi perdamaian Kamboja. Tingkat estafet yang diteruskan kepada Menlu Ali Alatas justru membawa warna baru terhadap pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dengan gaya yang berbeda. Pada faktanya, dihadapan Ali Alatas telah menunggu tantangan yang berbeda di mana mantan Menlu Mochtar telah membuka jalan menuju meja perundingan, kini tinggal Ali Alatas merumuskan formulasi yang tepat agar perjuangan yang telah dirintis oleh mantan Menlu Mochtar atas nama Indonesia tidaklah sia-sia.

Menlu Ali Alatas yang menyadari bahwa sekalipun *Ho Chi Minh City Understanding* merupakan terobosan penting yang dilakukan oleh Indonesia dalam kapasitasnya sebagai *Interlocutor* ASEAN, namun pada faktanya tidak semua negara ASEAN menyambut baik terobosan tersebut dan cenderung enggan untuk mendukung gagasan Indonesia untuk mengadakan pertemuan informal tersebut. Dalam kaitan ini, Menlu Alatas kemudian melakukan kunjungan ke negara-negara ASEAN guna meyakinkan mereka akan upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia tersebut. Strategi yang dilakoni Menlu Alatas dalam waktu yang relatif singkat berhasil memperoleh dukungan tidak hanya dari negara-negara tetangga (ASEAN), namun juga dari komunitas internasional.

Belum genap satu bulan Menlu Alatas menjalankan tugasnya, beliau sudah dihadapkan pada satu ujian yaitu untuk meyakinkan pihak CGDK untuk berpartisipasi pada JIM yang akan datang. Hal ini dilakukan pada saat penyelenggaraan konferensi UNESCAP di Jakarta, tanggal 13 April 1988. Menlu Alatas yang didampingi oleh Dirjen Politik Departemen Luar Negeri melakukan pembicaraan dengan delegasi CGDK yang diwakili antara lain oleh Pech Bunreth, Chak Sarik, Ouk Sereisopheak dan Son Suoubert. Dalam kesempatan tersebut, Nana Sutresna menyampaikan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dan Vietnam, maka pihak Vietnam dapat dipastikan kehadirannya pada JIM nanti. Demikian halnya dengan pembicaraan yang dilakukan oleh mantan Menlu Mochtar dengan pihak Uni Soviet pada bulan Februari di tahun yang sama, di mana Indonesia dapat

menyimpulkan sikap positif yang ditunjukkan oleh Uni Soviet terhadap prospek penyelesaian konflik ini. Menanggapi pernyataan Nana Sutresna dan Ali Alatas, delegasi CGDK menyampaikan kondisi politik terkini di dalam negeri di mana dapat dikatakan bahwa situasi masih belum banyak yang berubah, dan banyak pihak berpandangan bahwa situasi mungkin akan lebih membaik apabila Uni Soviet dapat meninggalkan Afghanistan. Hal lain yang disampaikan adalah keraguan pihak CGDK terhadap komitmen Vietnam untuk dapat berperan aktif pada pelaksanaan JIM nanti.

Pangeran Sihanouk yang berada di Korea Utara menyampaikan ucapan selamat atas diangkatnya Ali Alatas sebagai Menlu RI yang baru pada tanggal 23 Maret 1988. Selain itu, Sihanouk juga mengucapkan terima kasih kepada Indonesia dan ASEAN atas segala kontribusinya dalam penyelesaian konflik Kamboja. Untuk itu, Sihanouk menegaskan keikutsertaannya pada *Cocktail Party* atau yang juga dikenal dengan nama *Jakarta Informal Meeting* pada 25 Juli 1988. Dalam bulan-bulan berikutnya, Menlu Alatas yang menyadari akan pentingnya peran *capacity building* yang perlu dilakukan kepada Sihanouk, melakukan komunikasi melalui media surat-menyurat. Pada surat yang dikirimkan oleh Alatas pada tanggal 21 Mei 1988, atas balasan surat Sihanouk pada tanggal 25 April 1988, Alatas menyinggung tentang perkembangan yang telah dicapai atas persiapan pelaksanaan JIM pada tanggal 25 Juli tahun itu. Alatas juga menyatakan penghargaannya atas kesediaan Sihanouk pada JIM nanti. Demikian halnya dengan dukungan Sihanouk terhadap *Ho Chi Minh Understanding*, Alatas menyatakan kepercayaan dirinya akan kehadiran Vietnam pada JIM nanti yang sesuai dengan kesepakatan Ho Chi Minh tersebut.

Hal lain yang disampaikan oleh Menlu Alatas dalam suratnya adalah hasil dari pertemuan tahunan *Asean-European Commission* yang diselenggarakan di Dusseldorf pada tanggal 2-3 Mei 1988. Pada pertemuan tersebut, Indonesia ditunjuk sebagai koordinator ASEAN dalam perundingan dengan *European Commission* (EC) mengenai perkembangan politik di Kamboja. Dalam *Joint Declaration* yang dilahirkan, terdapat beberapa kesepakatan yang dicapai sebagai berikut: ASEAN dan EC menyambut

positif rencana penyelenggaraan JIM oleh Indonesia dalam rangka penyelesaian konflik Kamboja, kehadiran Sihanouk dan pihak Vietnam yang dianggap sangat vital terhadap jalannya perundingan dan pandangan akan penyelesaian konflik Kamboja yang tidak akan dapat tercapai sebelum pihak asing sepenuhnya mengangkat kaki dari bumi Kamboja.

Pada tanggal 4-5 Juli 1988, diselenggarakan pertemuan tingkat menteri di Bangkok, Thailand. Pertemuan yang membahas tentang perkembangan konflik di Kamboja, menyambut baik rencana pelaksanaan *Jakarta Informal Meeting* yang akan dilaksanakan pada bulan yang sama di Indonesia. Pertemuan tersebut juga menyatakan penghargaan yang tinggi atas perjuangan diplomasi Mochtar dalam mewujudkan pertemuan ini. Pernyataan ini seperti yang dikutip dari komunike bersama pada pertemuan tingkat Menteri ASEAN ke-21; *“the foreign ministers expressed their sincere appreciation for Professor Dr. Mochtar Kusumaatmadja, the former foreign minister of Indonesia for his untiring efforts as ASEAN’s Interlocutor with Vietnam and laying the ground work for the Jakarta informal meeting....in this connection, the foreign minister of Indonesia will proceed with his efforts.”*¹⁷⁰ Dengan demikian, Menlu Ali Alatas selaku pengganti Menlu Mochtar diharapkan dapat mampu untuk melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan perdamaian di Kamboja. Indonesia dapat cukup berbangga atas pengakuan ini. Peran Indonesia untuk mengupayakan penyelesaian konflik di Kamboja, menjadi jawaban atas tanggung jawabnya sebagai pendiri ASEAN untuk mempromosikan keamanan di kawasan, demi mewujudkan konsep ZOPFAN di kawasan.

3.2.3 Penerimaan Indonesia oleh Pihak-pihak yang Bertikai

Dalam upaya untuk mencari penyelesaian konflik Kamboja, dapat dikatakan bahwa kiprah Indonesia dimulai secara resmi sejak penunjukan Indonesia oleh ASEAN sebagai *Interlocutor* atau mitra wicara dengan pihak Vietnam pada pertemuan tahunan ASEAN tingkat Menteri di Jakarta pada bulan

¹⁷⁰ Hal ini turut tertuang dalam *Joint Communique* of the 21st ASEAN Ministerial Meeting di Bangkok, Thailand pada tanggal 4-5 Juli 1988. Diakses dari <http://www.aseansec.org/771.htm>, (waktu akses 28 April 2009, pukul 13.16wib).

Mei tahun 1984. Penunjukan ini merupakan titik awal dari *roadmap* Indonesia dalam menjalankan misinya menuju penyelesaian konflik Kamboja, di mana Indonesia memegang peran kunci terhadap pemecahan masalah melalui komunikasi langsung dengan pemeran utamanya yaitu Vietnam. Indonesia yang memiliki hubungan baik dengan Vietnam dipercaya akan diterima dengan baik oleh pihak Vietnam sehingga akan mampu untuk melakukan terobosan-terobosan baru guna menemukan solusi terhadap pemecahan masalah yang selama ini cenderung menemui jalan buntu.

Sebagai mediator yang diterima oleh pihak-pihak yang bertikai, maka Indonesia harus dapat meyakinkan pihak yang bertikai bahwa keadaan akan lebih baik jika dilakukan kompromi antar pihak daripada berkonflik yang akan menghancurkan masa depan negara. Untuk itu, sebagai *Interlocutor*, maka Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pendekatan dan berkomunikasi secara intensif dengan pihak Vietnam sesuai dengan posisi ASEAN. Pada saat ASEAN dikecam oleh Vietnam karena menyerukan dunia internasional untuk memberikan bantuan bagi gerakan perlawanan terhadap Vietnam di Kamboja, pihak Vietnam justru menghargai penunjukan Menlu Mochtar yang mewakili Indonesia untuk berfungsi sebagai penghubung antara ASEAN dan Vietnam guna mencari penyelesaian konflik di Kamboja.¹⁷¹ Vietnam secara lebih jauh juga menolak syarat yang diajukan oleh ASEAN yaitu untuk menciptakan suatu iklim yang konstruktif agar dapat membuka jalan menuju dialog dan negosiasi. Pada kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1985, Menlu Vietnam Nguyen Co Thach yang belum lama ditunjuk sebagai wakil jurubicara negara-negara Indochina,¹⁷² menyampaikan usulan yang telah digagas sebelumnya yaitu pembicaraan informal antara pemerintahan koalisi, dan Vietnam yang disertakan dengan perwakilan pemerintahan Phnom Penh. Pada kesempatan tersebut, Menlu Thach mengutarakan kepercayaannya terhadap keahlian

¹⁷¹ "Hanoi Kecam ASEAN Sambut Penunjukan RI." *Kompas* 15 Februari 1985.

¹⁷² Berdasarkan Komunique Bersama Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara Indochina pada tanggal 15 Juli-1 Agustus 1985 di Phnom Penh, Vietnam dipilih sebagai wakil jurubicara ketiga negara. Kendati demikian, ASEAN pada saat itu belum dapat menentukan sikap untuk menerima penunjukan Vietnam sebagai wakil negara-negara Indochina karena apabila hal ini dapat diterima, maka secara tidak langsung ASEAN juga turut mengakui rezim Heng Samrin sebagai pemerintah Kamboja yang didukung oleh Hanoi. Lihat "Pembicaraan Mochtar-Thach Langkah Baru Penyelesaian Krisis Kamboja." *Suara Karya*, 21 Agustus 1985.

diplomasi Menlu Mochtar untuk mengatur penyelenggaraan pertemuan dimaksud.¹⁷³

Sekalipun Indonesia baru mendapatkan daulat secara resmi dari ASEAN, namun peran Indonesia dalam mengupayakan penyelesaian konflik Kamboja telah dimulai jauh sejak awal konflik meletus. Misi diplomatik Indonesia terhadap Vietnam pertama kali tercatat sejak dicetuskannya Deklarasi Kuantan oleh Indonesia dan Malaysia pada tahun 1980. Inisiatif ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap konflik yang berkejolak di Kamboja atas dasar stabilisasi kawasan yang bebas dari pengaruh luar.¹⁷⁴ Suatu hal yang kontroversial dari deklarasi ini adalah pengakuan kedua negara inisiator akan adanya kepentingan Vietnam di wilayah Kamboja, di mana pengakuan dimaksud secara jelas berseberangan dengan konsep ASEAN yang mengecam pendudukan Vietnam atas Kamboja. Oleh sebab itu deklarasi ini tidak mewakili posisi ASEAN secara organisasi, dan bahkan mendapat tanggapan keras dari anggota ASEAN lainnya yaitu Singapura.

3.2.4 Dihormatinya Indonesia oleh Seluruh Pihak

Bukti penerimaan Indonesia oleh pihak-pihak yang bertikai tentunya secara langsung juga membuat Indonesia dihormati oleh pihak-pihak tersebut. Hal ini dibuktikan tidak lama setelah pemerintahan koalisi CGDK, dimana Perdana Menteri terpilih dari CGDK yaitu Sonn San melakukan kunjungan kepada Presiden Soeharto pada tanggal 21 Desember 1982. Dalam kesempatan tersebut, Sonn Sann mengungkapkan bahwa pemerintahan koalisi Kamboja akan mendengarkan berbagai masukan dan saran serta pengalaman Indonesia yang begitu gigih berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya, hingga dapat berhasil untuk membangun negeri.¹⁷⁵ Kehormatan terhadap Indonesia terpancar pada ucapan terima kasih Sonn San yang mewakili pemerintahan koalisi, di mana penghargaan ditujukan kepada Indonesia atas dukungan dan bantuan Indonesia

¹⁷³ "Golden Opportunity." *Jakarta Post*, 23 Agustus 1985.

¹⁷⁴ Tujuan politis dari Deklarasi Kuantan sebenarnya lahir dari kesamaan pandangan Indonesia dan Malaysia yang mengkhawatirkan ancaman ekspansionisme pengaruh China di kawasan Asia Tenggara. Khusus bagi Indonesia yang saat itu masih membekukan hubungan dengan China memandang Vietnam sebagai *buffer zone* yang tepat terhadap China. Lihat Sjamsumar Dam, Riswandi, *op. cit.*, hal 83.

¹⁷⁵ "Kamboja Akan Gunakan Saran-saran dan Pengalaman Indonesia." *Berita Buana*, 22 Desember 1982.

dalam upaya pencarian solusi atas konflik Kamboja. Indikasi atas penghormatan Kamboja terhadap Indonesia sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang. Tokoh kemerdekaan dan figur nomor satu di Vietnam yaitu Pangeran Sihanouk merupakan pengagum besar Presiden Soekarno. Atas dasar kedekatan persahabatan dan persaudaraan itulah Kamboja menaruh rasa hormat dan simpati yang tinggi kepada Indonesia¹⁷⁶. Bahkan setelah Presiden Soekarno telah tiada, Kamboja tetap bersahabat dengan baik dan sangat menghormati Indonesia. Sebagai bukti penghormatannya kepada Indonesia, Pangeran Sihanouk yang pada awalnya menolak untuk hadir pada JIM 1 di Bogor, akhirnya turut hadir atas undangan pribadi Presiden Soeharto. Hal ini menjadi pencapaian bagi Indonesia yang menyadari pentingnya kehadiran Sihanouk dalam pertemuan tersebut.

Sementara di pihak Vietnam, Indonesia pun menerima pengakuan atas *common grounds* pemecahan masalah yang dihadapi. Pada kunjungan Mochtar beserta rombongan ke Hanoi tanggal 16 Maret 1985 untuk bertemu dengan PM Pham Van Dong dan Menlu Nguyen Co Thach, PM Van Dong menegaskan bahwa dia percaya Indonesia dan Vietnam dapat bersama-sama bergandengan tangan untuk mencapai suatu penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Dalam pandangannya, kendati maksud dari kunjungan tersebut tidak mutlak untuk membicarakan masalah Kamboja, namun kunjungan ini dilakukan pada waktu yang sangat tepat untuk lebih mengintensifkan upaya menuju jalan penyelesaian masalah regional yang dihadapi kedua negara, tak dapat disangkal bahwa pernyataan ini sarat dengan nuansa substansi masalah Kamboja.¹⁷⁷

Menanggapi pernyataan PM Dong tersebut, Menlu Mochtar yang dalam perjalanan menuju tanah air menyempatkan diri untuk bertemu Menlu Siddhi Savetsila di Bangkok, mendapatkan apresiasi dan kehormatan dari Siddhi yang menyebutkan bahwa pembicaraan yang dilakukan oleh Mochtar telah mencapai

¹⁷⁶ Hubungan persahabatan yang sangat erat antara kedua negara dapat dilihat melalui intensitas kunjungan selama kurun waktu 1959 – 1964 dimana masing-masing kepala negara telah saling kunjung selama 5 kali. Landasan pengembangan hubungan tersebut kemudian dituangkan melalui Perjanjian Persahabatan kedua negara yang ditandatangani pada 13 Februari 1959 di Jakarta. Secara lebih jauh, kekaguman Pangeran Sihanouk akan Presiden Soekarno juga terpancar melalui kebijakan luar negeri Kamboja selama periode 1950an hingga 1960an yang kurang lebih serupa yaitu anti kolonialisme dan anti imperialisme. Lihat *Nazaruddin Nasution dkk*; BAB I Merintis Hubungan Diplomatik (1955-1962).

¹⁷⁷ "Pham Van Dong Beri Persetujuan Atas Hasil-hasil Perundingan Mochtar-Co Thach." *Sinar Harapan*, 18 Maret 1985.

suatu kemajuan yang positif. Hal ini juga didukung oleh pernyataan wakil Perdana Menteri Thailand, Bichai Rattakul yang pada kunjungannya ke Indonesia bulan Mei 1984 menyatakan dukungan sepenuhnya atas peranan yang dimainkan oleh Indonesia karena Bichai meyakini kapasitas Indonesia yang selalu berpegang teguh pada solidaritas ASEAN¹⁷⁸.

Selain dari para pihak yang bertikai, peran Indonesia tidak kalah mendapat pengakuan dari pihak luar sebagai bagian dari *'peace corps'* konflik Kamboja. Menlu Australia, Gareth Evans dalam gagasannya untuk mengintensifkan peran Dewan Keamanan PBB guna menggali lebih lanjut berbagai aspek penyelesaian konflik Kamboja di tahun 1990 menyebutkan bahwa Australia tidak bermaksud lebih dari sekedar narasumber terhadap gagasan yang diusulkannya, Evans percaya bahwa peran negosiasi telah dilakukan secara sangat baik oleh sahabat baiknya, Menlu Ali Alatas. Hal ini disampaikan olehnya kepada Presiden Soeharto pada kunjungan ke Indonesia bulan Februari tahun 1990.¹⁷⁹

3.2.5 Pengetahuan dan Keahlian Indonesia Dalam Memecahkan Masalah

Salah satu keberhasilan Indonesia yang dicapai berdasarkan pengetahuan dan keahlian Indonesia adalah dalam merumuskan pengaturan jalannya persidangan pada serangkaian pertemuan, yang diawali pada JIM I yang diadakan di Bogor. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pihak Vietnam kerap menunjukkan kekerasannya untuk dapat turut hadir pada JIM I. Syarat yang diajukannya antara lain adalah format pengaturan sidang, sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati pada *Ho Chi Minh City Understanding*. Dalam kesepakatan tersebut, telah disetujui format pertemuan dua tahap, di mana pada tahap pertama empat faksi yang bertikai akan bertemu terlebih dahulu, dan kemudian tahap kedua akan dipertemukan keempat faksi tersebut ditambah dengan negara-negara anggota ASEAN serta dua negara anggota Indochina lainnya. Dengan kejelian Indonesia maka format persidangan dimodifikasi menjadi dua tahap yang dilakukan silih berganti, sehingga substansi yang

¹⁷⁸ "Muangthai Dukung Usaha Terobosan Pecahkan Soal Kamboja". *Kompas* 15 Maret 1984.

¹⁷⁹ "Catatan dari Pertemuan Informal tentang Kamboja: Setelah Sebelas Tahun masih Gagal Juga." *Suara Pembaruan* 3 Maret 1990 dan "Gareth Evans; Tak Seorang Pun Harapkan Terobosan Diplomatis". *Suara Pembaruan* 24 Februari 1990.

diperoleh pada tahap pertama dapat segera didiskusikan pada pertemuan tahap kedua.

Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan JIM I, maka Indonesia menyadari bahwa misi ini memerlukan upaya yang tidak mudah. Selain lobi diplomatik yang diluncurkan oleh Indonesia, tidak jarang Indonesia pun harus melakukan tekanan kepada pihak-pihak tertentu untuk dapat berjalan dalam satu koridor. Hal ini dilakukan oleh Indonesia pada saat Sihanouk dibujuk untuk dapat hadir pada JIM I. Metode penekanan yang dilakukan Indonesia adalah seperti lazimnya praktek diplomasi yang bervariasi dari kunjungan-kunjungan resmi, ataupun korespondensi surat menyurat. Sebagai contoh, dalam upayanya merealisasikan *Cocktail Party* sebagai salah satu misi utama Indonesia dalam penyelesaian konflik di Kamboja, Menlu Mochtar tercatat mencapai beberapa terobosan melalui beberapa kunjungannya. Dalam rangkaian kunjungannya, Mochtar menegaskan kembali perihal gagasan *Cocktail Party* yang bertujuan untuk mengumpulkan semua pihak yang terkait dalam konflik Kamboja guna membicarakan proses perdamaian. Menlu Mochtar dalam kesempatan tersebut menekankan pada semua pihak tentang pentingnya kehadiran seluruh pihak sebagai itikad baik terhadap pemahaman bersama yaitu guna menemukan solusi terhadap konflik yang berkepanjangan.¹⁸⁰ Metode surat menyurat dilakukan oleh Menlu Alatas guna membujuk Khmer Merah untuk dapat hadir IMC yang diselenggarakan di Jakarta.

Dengan diselenggarakannya JIM I pada tanggal 21-25 Juli 1988, maka pertemuan ini bertindak sebagai titik tolak dari serangkaian upaya yang telah dijalankan, sebab untuk pertama kalinya sukses mengumpulkan pihak-pihak yang bertikai untuk berpartisipasi pada pertemuan ini guna mengutarakan pandangan mereka dan berupaya untuk membicarakan suatu usaha bersama demi tercapainya perdamaian di Kamboja. Sebagai suatu terobosan baru, dapat diperkirakan seperti apa kondisi di dalam ruangan tempat keempat faksi berunding. Setiap faksi dapat diasumsikan telah mempersiapkan argumentasi masing-masing yang mengukung agenda kepentingan yang berbeda-beda untuk diperdebatkan di dalam perundingan. Pada pertemuan awal ini, pemikiran atas suatu kerangka

¹⁸⁰ Nazaruddin Nasution, dkk, *op. cit.*, hal 107.

penyelesaian konflik politik yang menyeluruh seakan-akan jauh dari harapan. Di dalam agenda masing-masing, akan sulit kiranya bagi mereka untuk memberikan konsesi yang berlebihan sehingga akan berpotensi untuk mempersulit posisi mereka pada perundingan-perundingan selanjutnya. Konsep “*power sharing*” merupakan target utama masing-masing faksi yang akan dirundingkan demi tercapainya suatu solusi yang memungkinkan.

Di sinilah peran Indonesia menghadapi ujian-ujian awal. Menjalankan fungsi mediator di rumah sendiri, Indonesia harus sangat hati-hati bersikap, baik dalam menengahi perdebatan maupun dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada masing-masing faksi dalam rangka mengakomodir kepentingan setiap pihak hingga perumusan hasil akhir dari pertemuan ini. Proses JIM dibagi ke dalam dua tahap, di mana tahap pertama dipertemukan keempat faksi yang bertikai dipersilahkan untuk berbicara secara langsung dalam suasana perundingan. Sementara itu, tahap kedua adalah pertemuan seluruh peserta JIM yang dipimpin langsung oleh Menlu Ali Alatas untuk membahas elemen-elemen dasar penyelesaian masalah. Beberapa hal yang menonjol adalah perihail penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan pembentukan pemerintahan bersama atau disebut dengan *Quadripartite* yang sifatnya sementara sampai dengan penyelenggaraan Pemilu. Perdebatan lahir pada isu penarikan mundur pasukan Vietnam yang dikawatirkan pihak tertentu akan berakibat pada kembalinya rezim Pol Pot.

Di sisi lain, pihak-pihak tertentu juga menegaskan bahwa pendudukan rezim Vietnam di PBB telah melanggar hukum-hukum internasional yang secara jelas juga tertuang di dalam piagam PBB. Untuk menengahi perdebatan ini, Menlu Alatas yang mewakili Indonesia sebagai mediator menyimpulkan dua persoalan inti yang menjadi permasalahan yaitu penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja sebagai masalah yang perlu segera diselesaikan dalam rangka penyelesaian yang menyeluruh di Kamboja dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka mencegah kembalinya rezim Pol Pot di Kamboja. Berangkat dari kedua masalah inti tersebut, Indonesia selaku mediator kemudian mengambil inisiatif untuk menyusun konsep hasil akhir pertemuan. Kesepakatan yang dicapai tertuang dalam dua bentuk dokumen yaitu pernyataan ketua sidang (*Chairman's*

Statement) dan keputusan JIM I yang berisi langkah-langkah tindak lanjut sebagai kesepakatan bulat dari para peserta.

Sekalipun pada pertemuan ini terdapat banyak perbedaan yang terlihat masih jauh untuk mencapai tujuan bersama, namun hasil dari pertemuan ini dapat mencerminkan suatu terobosan yang menjadi awal mula yang membanggakan. Hal ini dapat terlihat melalui kutipan pernyataan press sebagai berikut:

“The participants recognised the complexities of the kampuchean problems in its many dimensions and aspects and its ramifications which are both regional and international in scope. They, therefore, concurred on the need to have further discussions on issue son which there were still divergence of the views”.

Kendati JIM I dinilai tidak terlalu berhasil mencapai sesuatu yang bersifat substantive bagi kesepakatan bersama, namun fakta bahwa masing-masing faksi yang bertikai dapat bertemu muka satu dengan yang lain merupakan momentum yang bersejarah, dan menunjukkan kepada dunia bahwa pertemuan ini merupakan proses awal dari serangkaian proses yang akan diupayakan oleh berbagai pihak demi tercapainya suatu penyelesaian politik yang menyeluruh (maka dibentuklah suatu *meeting group* untuk membahas berbagai proposal yang diajukan oleh faksi-faksi tersebut).

Lobi yang dilakukan oleh Indonesia melalui undangan pribadi Presiden Soeharto, sukses menghadirkan Norodom Sihanouk pada acara ini. Selain membawa atmosfir yang positif terhadap seluruh faksi yang bertikai, kehadirannya juga seakan ingin menyampaikan pesan kepada dunia, bahwa sebagai figur sentral di negaranya, Sihanouk merindukan tercapainya rekonsiliasi nasional yang kelak akan membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya yang telah cukup menderita selama kurang lebih satu dekade terakhir.

Untuk kedua kalinya, pada bulan Februari 1989, faksi-faksi yang bertikai bersama-sama dengan anggota ASEAN, berpartisipasi pada *Jakarta Informal Meeting II* (JIM II). Hasil dari pertemuan kedua inipun masih belum mencapai solusi yang konkrit, namun meninggalkan pekerjaan rumah bagi masing-masing faksi untuk melakukan introspeksi secara internal dan memberikan konsesi atas pendiriannya.

Indonesia kembali menjadi tempat pelaksanaan pembicaraan intra Kamboja yang dilakukan dari tanggal 2-3 Mei 1989 antara Sihanouk dengan Hun Sen. Dalam hal ini, Indonesia memandang bahwa pembicaraan ini dapat dijadikan suatu batu loncatan bagi proses Indonesia memegang teguh prinsip bahwa perkembangan yang telah dicapai dilain pihak juga melahirkan semangat dan motivasi bagi seluruh pihak sehingga menjadi suatu momentum yang tidak dapat disia-siakan.

Koferensi Internasional Paris (PIC) yang diselenggarakan pada 30 Juni – 30 Juli 1989 ternyata masih belum mampu untuk menelurkan kesepakatan konsensus, sekalipun rumusan pembicaraan telah mencapai tingkat kesepakatan. Berbagai pihak berpandangan bahwa hasil yang telah dicapai tidak bersifat signifikan terhadap upaya penyelesaian yang menyeluruh yang merupakan tujuan awal diselenggarakannya konferensi bertingkat internasional tersebut. Hal ini antara lain disebabkan oleh tetap kerasnya posisi masing-masing faksi yang bertikai untuk mencapai suatu rekonsiliasi nasional karena masing-masing memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep power sharing. Kendala lainnya terletak pada format persidangan yang menggunakan *unanimity* (suara bulat), bukan sistem konsensus. Hal ini juga ditegaskan Ali Alatas yang menyampaikan bahwa sistem konsensus merupakan format yang ideal berdasarkan pengalamannya menjabat sebagai Kepala Perwakilan Tetap untuk Indonesia di PBB.¹⁸¹ Kendati demikian, Ali Alatas yang bertindak sebagai *Co-Chairman* pada pertemuan ini masih memiliki rasa percaya diri yang tinggi bahwa prospek atas solusi masalah ini sudah berada tidak jauh dari genggaman.

Langkah yang ditempuh selanjutnya oleh Indonesia dan Perancis selaku ketua bersama PIC adalah menggagas pembentukan pemerintahan sementara Kamboja dengan komposisi Sihanouk bertindak sebagai kepala negara dan Hun Sen sebagai perdana menteri.¹⁸² Apabila hal ini dapat terealisasi, maka langkah selanjutnya adalah pemerintah sementara ini akan menyelenggarakan pemilu dengan kondisi setelah pasukan Vietnam ditarik seluruhnya dari Kamboja. Hun Sen menolak gagasan ini, atas prinsip bahwa pihaknya terlalu dipojokan,

¹⁸¹ “Setelah Sebelas Tahun Masih Gagal Juga; Catatan dari Pertemuan Informal tentang Kamboja.” *Suara Pembaruan*, 3 Maret 1990.

¹⁸² Nazaruddin Nasution, dkk, *op. cit.*, hal 138.

sementara faktanya pemerintahannya yang telah berkuasa selama hampir satu dekade terakhir.¹⁸³

Menindaklanjuti perkembangan tersebut, Indonesia kembali menyetujui menukangi pertemuan berikutnya. Pada pertemuan informal mengenai Kamboja (IMC) di Jakarta tanggal 26-28 Februari 1990, perdebatan mulai terfokus pada pemikiran untuk melibatkan pihak PBB. Lagi-lagi, pembicaraan seakan menghantam tembok dengan kata kunci genosida yang menjadi ganjalan oleh pihak Hun Sen dan Khieu Samphan. Pada akhirnya masing-masing pihak setuju untuk melibatkan PBB, walaupun tidak ditentukan batasan-batasan dan modalitasnya.

Pelaksanaan IMC sesungguhnya membawa angin segar terhadap serangkaian upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia. Hal ini dengan tegas menandakan determinasi Indonesia sebagai mediator perdamaian atas konflik yang sekian lama berjibaku di kawasan. Dengan keterlibatan DK yang menggagas “*Comprehensive Peace Plan*” yang juga didukung oleh proposal pihak Australia, maka Indonesia setuju untuk mentuan rumahi pertemuan lanjutan. Kesatuan faksi oposisi kemudian mengeluarkan pernyataan bersama yaitu dengan berkomitmen untuk menerima peran PBB dalam administrasi negara sebelum mereka menyelesaikan perselisihan mereka melalui pemilu.

Dalam rangka memastikan kehadiran Sihanouk pada pertemuan JIM II, Menlu Alatas di sela-sela kunjungannya ke Paris dan Bangkok pada awal Januari 1989, mengadakan pertemuan dengan Sihanouk guna meyakinkan pentingnya penyelenggaraan JIM II dalam rangka pembahasan lebih jauh kelanjutan perkembangan yang telah dicapai melalui JIM I, untuk itu kehadiran Sihanouk kembali diharapkan oleh semua pihak.¹⁸⁴ Pada kesempatan tersebut, Menlu Alatas turut menyampaikan pesan khusus dari Presiden Soeharto yang mengundang Sihanouk secara pribadi untuk turut hadir di Jakarta. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menlu Alatas juga memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dan berbincang dengan pemimpin Khmer Merah yaitu Khieu Sampan dan pemimpin

¹⁸³ *Ibid.* Hal 139.

¹⁸⁴ “Alatas Bertemu Sihanouk di Paris Hari Selasa.” *Suara Pembaruan*, 8 Januari 1989.

KPNLF, Sonn San juga untuk turut menjamin kehadiran mereka pada JIM II nanti.¹⁸⁵

Proses yang melelahkan ini dilanjutkan kembali pada pertemuan di Jakarta, 9-11 November 1990 seperti yang digagas oleh Indonesia dan Perancis. Selain kedua negara yang bertindak sebagai *Co-Chairmen*, turut hadir pula 5 negara DK PBB, serta delegasi dari 7 negara lainnya. Secara konsensus, para peserta rapat setuju dengan keterlibatan PBB dalam administrasi pemerintahan sampai dengan dilaksanakannya pemilu sebagai muara dari proses penyelesaian konflik ini. Indonesia turut mendukung pembentukan *Supreme National Council* (SNC) seperti yang diutarakan oleh Presiden Soeharto pada pidatonya dalam memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-46, tanggal 17 Agustus 1991. Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya merasa bangga akan peran yang dimainkan hingga dapat tercapainya tahapan yang telah menunjukkan titik terang.

Demi mengantisipasi terulangnya beberapa kegagalan yang terjadi pada beberapa pertemuan sebelumnya, maka sepulangnya dari sidang majelis umum PBB yang ke-45 pada bulan September, Ali Alatas bersama dengan Menlu Perancis Roland Dumas memutuskan untuk menyusun format pertemuan yang baru yang akan digunakan pada pertemuan Paris. Skema ini terdiri dari tiga tahap pertemuan, yang pertama adalah untuk pejabat senior guna membahas usulan perdamaian yang diusung oleh Dewan Keamanan PBB dan kemudian disusun menjadi rancangan perdamaian tanpa melibatkan faksi-faksi Kamboja. Tahap kedua adalah pertemuan setingkat pejabat senior yang akan mempersiapkan dokumen persetujuan damai untuk ditandatangani pada konferensi Paris, dan tahap yang ketiga adalah penandatanganan persetujuan penyelesaian yang menyeluruh atas konflik Kamboja di Konferensi Paris.

Pertemuan akbar akhirnya digelar di Paris, dimana Indonesia dan Perancis kembali bertindak sebagai *Co-Chairmen*. Lima negara anggota DK dan seorang perwakilan PBB turut mengambil andil terhadap pengambilan keputusan konsensus dalam upaya pemulihan perdamaian di Kamboja. Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Kamboja, maka upaya dan inisiatif Indonesia untuk

¹⁸⁵ "JIM Kedua di Jakarta 19-21 Februari." *Suara Pembaruan*, 18 Januari 1989.

membawa perdamaian ke Kamboja akhirnya membuahkan hasil. Dengan berakhirnya konflik Kamboja, maka hal ini dapat turut mempromosikan solidaritas dan kerukunan ASEAN. Inilah yang menjadi prestasi Indonesia dalam mewujudkan kebijakannya untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi demi memelihara kesatuan dan kekompakan organisasi yang turut dibangunnya tersebut.

Setelah ditandatanganinya kesepakatan Paris, Indonesia juga turut mengambil andil dalam pengiriman tim UNAMIC PBB yang berkomposisi kurang lebih 200 personil, termasuk tiga perwira ABRI Indonesia, di mana satu diantaranya bertindak sebagai wakil komandan.¹⁸⁶

Tercatat, inisiatif lain yang dikembangkan oleh Menlu Mochtar adalah pada saat Menlu Mochtar mengunjungi Hanoi pada tanggal 15 Maret 1985 dalam rangka mengajukan usulan perbaikan hubungan Vietnam dengan Amerika Serikat. Menurut pandangannya, isu ini merupakan salah satu alternatif jalan keluar yang dapat ditempuh dalam rangka mengupayakan resolusi konflik terhadap masalah Kamboja. Secara lebih spesifik Menlu Mochtar bermaksud agar Vietnam dapat segera menyelesaikan masalah hilangnya prajurit-prajurit Amerika Serikat yang hilang atau dikenal dengan sebutan MIA (*Missing in Action*) semasa perang Vietnam (1965-1975).¹⁸⁷ Sebagai bagian dari kebijakan Indonesia untuk mengakhiri krisis yang melanda Indochina, Indonesia memandang bahwa MIA merupakan terobosan penting dalam upaya normalisasi hubungan kedua pihak yang selama ini kerap menjadai ganjalan. Normalisasi hubungan antara kedua negara tersebut tentunya akan mampu untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dengan meyakinkan Vietnam agar tidak memusingkan kondisi keamanannya, dan di sisi lain Amerika Serikat akan lebih percaya diri dengan masa depan politik Kamboja. Melalui normalisasi ini bantuan ekonomi Amerika Serikat akan mengalir ke Hanoi yang juga berarti bahwa Hanoi akan mengurangi ketergantungannya terhadap Uni Soviet.¹⁸⁸

¹⁸⁶ "Empat Dokumen Penyelesaian Kamboja ditandatangani Rabu." *Suara Pembaruan*, 22 Oktober 1991.

¹⁸⁷ "Penyelesaian Masalah Kampuchea Mengalami Kemajuan." *Berita Buana*, 28 Desember 1985.

¹⁸⁸ *Ibid.*

Upaya Indonesia dalam merumuskan terobosan ini berhasil menuai tanggapan yang positif. Pendekatan yang dilakukan oleh Menlu Mochtar terhadap Amerika Serikat untuk memastikan formulasi ini dapat berjalan dengan lancar, telah menempatkan Indonesia sebagai mediator bagi kedua pihak. Dalam suatu kesempatan, Amerika Serikat menyatakan bahwa penyelesaian masalah MIA akan lebih memudahkan pihak Amerika Serikat untuk memainkan perannya atas penyelesaian konflik Kamboja. Seakan mendapat angin segar, Vietnam memanfaatkan momentum ini dengan memberikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti masalah MIA tersebut.

Dalam rangka memuluskan rencana Indonesia untuk mendamaikan Vietnam dan Amerika Serikat, maka Menlu Mochtar menyadari bahwa Indonesia harus mendapatkan dukungan dari pihak China, karena melalui dukungan tersebut, maka upaya menuju penyelesaian konflik dijamin akan lebih menemui titik terang. Dalam merealisasikan misi ini, maka Menlu Mochtar mencoba untuk membuat skenario dimana pada konferensi Bandung kedua yang dilaksanakan di Bandung, Menlu Mochtar juga berharap dapat melakukan pendekatan kepada pihak China dan Vietnam. Harapan ini tidak terealisasi karena ketidakhadiran perdana menteri Pham Van Dong pada konferensi tersebut.

3.2.6 Kepemilikan Sumberdaya Fisik yang Dimiliki oleh Indonesia

Keberhasilan peran Indonesia sebagai mediator tidak lepas dari berbagai andil dalam bentuk sumberdaya fisik guna memfasilitasi proses penyelesaian konflik, melalui perundingan dan mediasi. Indonesia pertama kali mengajukan inisiatif untuk bertindak sebagai penengah atau mediator pada konflik Kamboja ini ditandai pertama kali Indonesia melalui Menlu Mochtar yang mengajukan Indonesia selaku tuan rumah JIM I telah mempersiapkan seluruh fasilitas guna melancarkan jalannya pertemuan yang bersejarah ini. Dalam kaitan ini, hal teknis seperti pengaturan meja dan kursi pada setiap sesi pun akan sangat berpengaruh terhadap kesan yang dituai oleh pihak tuan rumah. Keprotokolan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara seksama, di mana setiap tamu harus diperlakukan sama derajat. Atas dasar inilah pihak Vietnam dan Phnom Penh

akhirnya bersedia hadir pada pertemuan ini, yaitu tanpa prasyarat, tanpa label politik, dan persamaan derajat.¹⁸⁹

Melalui serangkaian penjelasan di atas mengenai peranan Indonesia dalam proses penyelesaian konflik Kamboja melalui pendekatan teoritis yang digariskan oleh Marvin C. Ott, sangatlah jelas terlihat bahwa peranan Indonesia sangat signifikan dan dominan dalam memfasilitasi serangkaian pertemuan baik secara formal maupun informal, hingga dicapainya kesepakatan pada forum PICC tahun 1991. Di samping itu, walau kriteria indenpendensi Indonesia dari pihak-pihak yang bertikai tidak berhasil dipenuhi, pencapaian lima kriteria kapabilitas lain yang berhasil dipenuhi Indonesia dapat menggambarkan totalitas peranan Indonesia dalam proses penyelesaian konflik Kamboja. Uraian penjelasan peranan Indonesia dalam proses penyelesaian konflik Kamboja di atas dapat dilihat secara ringkas pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1

Kronologis Peranan Indonesia Dalam Proses Penyelesaian Konflik Kamboja

Peran/ peristiwa	Periode/ tahun	Pihak terkait	Hasil
Dipilihnya Indonesia sebagai <i>Interlocutor</i> ASEAN dengan Vietnam.	Mei 1994	Negara-negara ASEAN dan Vietnam.	
Langkah – langkah yang ditempuh Indonesia dalam kapasitasnya sebagai <i>Interlocutor</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan Pejabat-pejabat Indonesia ke Vietnam dan sebaliknya. • Indonesia-Vietnam Working Group Meeting: - Working Group 	Pendekatan khusus Indonesia – Vietnam. 23-24 Desember	Indonesia-Vietnam	<ul style="list-style-type: none"> • Rangkaian kunjungan L.B. Moerdani ke Vietnam sebagai Utusan Khusus RI. • Kunjungan Menlu Mochtar ke Hanoi dan serangkaian kota di berbagai negara lainnya untuk penajakan pembicaraan.

¹⁸⁹ “Meja yang Bundar Untuk JIM.” *Suara Pembaruan*, 23 Juli 1988.

Meeting ke-1 di Jakarta. - Working Group Meeting ke-2 di Hanoi. - Working Group Meeting ke-3 di Jakarta.	1985 20 Februari 1986 12-13 Agustus 1986		
Menlu Mochtar mengusulkan rencana penyelenggaraan <i>Cocktail Party</i> di Jakarta. Kunjungan Menlu Mochtar ke Pyong Yang untuk bertemu Sihanouk.	November 1985 6 Juli 1987	Faksi - faksi yang bertikai, ASEAN, Vietnam, China, Uni Soviet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan Menlu Indonesia ke berbagai negara untuk mensosialisasikan rencana tersebut & mendapatkan jaminan kehadiran para <i>stakeholders</i>. <p>Mendapatkan jaminan kesediaan Sihanouk untuk hadir pada <i>Cocktail Party</i>.</p>
Kunjungan Menlu Mochtar ke Ho Chi Minh. (<i>Ho Chi Minh City Understanding</i>)	29 Juli 1987	Indonesia-Vietnam	Komunike bersama mengenai Persetujuan pihak Vietnam untuk hadir pada JIM.
JIM I di Bogor, Indonesia.	25-28 Juli 1988	Empat faksi yang bertikai, negara – negara ASEAN, Laos, Vietnam	Pernyataan ketua sidang dan langkah2 tindak lanjut mengenai dua persoalan inti yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Langkah-langkah dalam rangka mencegah berkuasanya kembali rezim Pol Pot. - Penarikan mundur pasukan Vietnam
JIM II di Jakarta, Indonesia.	16-18 Februari 1989	Empat faksi yang bertikai, negara – negara ASEAN, Laos, Vietnam.	Pernyataan konsensus ketua sidang yang berintikan pada tindak lanjut hasil JIM I beserta (juklak) petunjuk pelaksanaannya.
Paris International Conference (PIC) di Paris.	30 Juli – 30 Agustus 1989	19 Negara	

Informal Meeting on Cambodia (IMC) I. Merupakan gagasan Indonesia dan Perancis yang dilaksanakan di Jakarta.	26-28 Februari 1990	Empat faksi yang bertikai, negara – negara ASEAN, Laos, Vietnam, Perancis, PBB dan Australia.	Kesepakatan informal ” <i>possible points of common understanding</i> ” yang berintikan pada pembentukan SNC.
IMC II	9-10 September 1990	Empat faksi yang bertikai, negara – negara ASEAN, Laos, Vietnam, Perancis dan PBB.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan SNC • Kesepakatan 4 faksi atas dokumen kerangka kerja yang diajukan oleh DK PBB sebagai bentuk penyelesaian politik konflik Kamboja secara menyeluruh.
Paris International Conference on Cambodia (PICC) di Paris.	23 Oktober 1991	19 Negara dan DK PBB	Persetujuan Penyelesaian Politis secara menyeluruh dari Konflik Kamboja.